

Koordinas penyidik pegawai negeri Sipil Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai alam penegakan hukum hak kekayaan intelektual

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323403&lokasi=lokal>

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI merupakan hak yang perlu dilindungi karena adanya hak alami bagi pemegang HKI yang sah untuk mendapatkan perlindungan atas hasil pemikiran serta daya ciptanya. Selain itu, perlindungan terhadap HKI diperlukan karena dalam bidang ekonomi, HKI merupakan bagian dari investasi di masa depan. Akan tetapi, penegakan hukum atas HKI di Indonesia masih lemah yang menyebabkan tingginya tingkat pelanggaran HKI. Permasalahan yang sering menjadi sorotan karena dianggap penyebab lemahnya penegakan hukum adalah tidak adanya kesamaan persepsi antar instansi serta aparat yang terkait dengan penanganan pelanggaran HKI. Padahal, persamaan persepsi tersebut diperlukan dalam hal melakukan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan penegakan hukum HKI. Apalagi, tindak pidana HKI yang terjadi saat ini tidak murni merupakan tindak pidana HKI sehingga diperlukan adanya koordinasi antar lembaga. Koordinasi tersebut tentu saja memiliki mekanisme dan kendala-kendala khusus. Adanya koordinasi antar lembaga dalam hal penegakan hukum HKI juga menyebabkan penanganan kasus tindak pidana HKI berbeda dengan tindak pidana lainnya. Hal ini terlihat dalam penanganan kasus penyelundupan CD keping Playstation bajakan dan penyelundupan merek Marlboro palsu.